

ABSTRAK

Seiring perkembangan teknologi yang semakin tahun semakin canggih, trobosan yang diciptakan kepolisian republik indonesia juga semakin canggih yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang diberi nama ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Dalam mekanisme ETLE, bagi pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan denda yang sudah diatur sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sinkronisasi hukum pengaturan ETLE menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis sinkronisasi hukum pengaturan ETLE menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait dengan pemberlakuan kembali tilang manual dan manfaat penelitian ini adalah memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang sinkronisasi hukum pengaturan ETLE menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sinkron dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur jelas mengenai posisi sistem elektronik/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Begitu pula secara vertikal terdapat kesinkronan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2022 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Surat Telegram Nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023 yang menentukan bahwa ETLE sebagai salah satu cara penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian.

Keywords: lalu lintas; pelanggaran; sinkronisasi

ABSTRACT

Along with the development of technology which is increasingly sophisticated, the breakthrough created by the Indonesian republic police is also increasingly sophisticated, namely by utilizing technology called ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). In the ETLE mechanism, violators who are proven to have committed an offense will be subject to a fine that has been regulated in accordance with Law No. 22 of 2009. The formulation of the problem in this study is how the legal synchronization of ETLE arrangements according to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The purpose of this research is to find out, describe, and analyze the legal synchronization of ETLE arrangements according to law no. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation related to the re-enactment of manual tickets and the benefits of this research are to provide benefits for the development of legal science, especially regarding the legal synchronization of ETLE arrangements according to Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The method used is normative juridical using statutory and conceptual approaches. Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is synchronized with Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which clearly regulates the position of electronic systems / electronic documents as valid evidence. Likewise, vertically there is synchronization of the provisions as intended by Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 23 of Government Regulation No. 80 of 2022 concerning How to Check Motor Vehicles and Telegram Letter Number ST/830 / IV / HUK.6.2./2023 which determines that ETLE is one of the ways of prosecuting traffic violations committed by the police.

Keywords: *traffic; violation; synchronization*